

EVALUASI SISTEM PEMUTAKHIRAN DATA PENERIMA BANTUAN PKH DI DESA WADENG KABUPATEN GRESIK

Muhammad Syihabur Rohman¹, Slamet Muchsin², Hirshi Anadza³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang. 65144, Indonesia

E-mail : syihab469@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya membangun sistem perlindungan masyarakat miskin. Namun masih terdapat masalah yang timbul seperti ketidakmerataan penerima PKH yang ada di Desa Wadeng Kabupaten Gresik. Terdapat data sebanyak 528 KK serta yang tergolong dalam RTSM berjumlah 225 KK. Namun yang mendapatkan program bantuan PKH hanya sebanyak 122 KK sehingga distribusinya belum merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Evaluasi sistem pemutakhiran PKH sudah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, validasi, pendampingan pencairan bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen peserta PKH serta adanya sanksi yang cukup jelas dan tegas. (2) Evaluasi Data PKH adanya dukungan koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dalam implementasi sistem pemutakhiran PKH juga antusias para peserta PKH, peran pendamping PKH merupakan aktor yang sangat penting. (3) Faktor penghambat pada awal pelaksanaan daya tangkap dari masyarakat miskin sebagai penerima bantuan masih kurang, penerima bantuan cenderung agak sulit untuk diajak berkoordinasi dan partisipasi masyarakat masih rendah, konflik yang terjadi antara individu.

Kata kunci : Evaluasi, Pemutakhiran Data, Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu cerminan pembangunan negara, apakah pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya segelintir orang saja. Dilihat dari sisi *poverty profile* atau bentuk-bentuk persoalan kemiskinan masyarakat, menurut Tjokrowinoto kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata; tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia lebih banyak di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Data BPS Tahun 2022 menyatakan total orang miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang pada Maret 2022. Dari jumlah tersebut 14,34 juta ada di pedesaan, dan 11,82 juta ada di perkotaan (BPS, 2023). Kemiskinan di perkotaan disebabkan lowongan kerja sempit dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan ke desa. Selain itu memang kuantitas angka kemiskinan serta keluarga

pra sejahtera masih sangat tinggi, karena di Desa kaya dengan sumber daya alam yang belum tergarap dengan maksimal. Dengan begitu, pengangguran yang memicu angka kemiskinan dapat ditekan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga (Kartiwati:2017). Untuk mengatasi kemiskinan yang ada, pemerintah membuat sebuah program penanggulangan kemiskinan agar kemiskinan yang ada di Indonesia dapat menurun.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan atau kurang sejahtera yaitu dengan menerapkan PKH. Program bantuan tunai bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama PKH atau *Conditional Cash Transfer* (CCT) adalah program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia (Rosalina, 2018). PKH merupakan program bantuan berbasis keluarga yang diberikan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka.

PKH ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama PKH sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional*

Cash Transfer (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Kemensos RI, 2015).

Salah satu Desa yang mendapatkan alokasi dana Bantuan keluarga harapan tersebut adalah Desa Wadeng di Kabupaten Gresik. Penduduk Desa Wadeng berjumlah 1.724 orang dengan total 528 KK yang mendapatkan bantuan keluarga miskin dari pemerintah. Dari beberapa bantuan pemerintah tersebut, berjumlah 122 KK mendapatkan bantuan yang berjenis PKH. Program PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik ini sudah ada sejak tahun 2016 dengan jumlah penerima bantuan yaitu 30 KK hingga pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 122 KK menerima PKH. Program PKH ini ditujukan kepada masyarakat miskin dengan ber kriteria ibu hamil, lansia, balita serta masyarakat penyandang disabilitas. Akan tetapi yang menjadi sorotan dari total penduduk sebanyak 122 KK, sebanyak 528 KK mendapatkan bantuan pemerintah berjenis bantuan subsidi PKH. Padahal yang terlihat selama pengamatan observasi, banyak masyarakat yang menerima bantuan PKH dari pemerintah banyak yang dianggap dalam kondisi tidak miskin jika dilihat berdasarkan dari segi rumah masyarakat penerima bermanfaat. Adapun Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima bantuan PKH tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

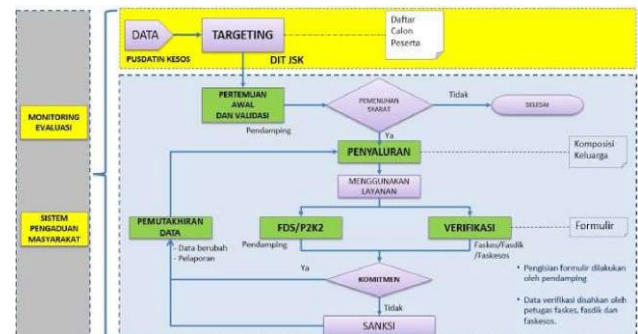
Tabel 1.1
Jumlah penduduk dengan jumlah rumah tangga miskin yang menerima bantuan PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik.

NO	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			RTSM		Penerima PKH
		LK	PR	Jumlah	KK	%	
1	528	878	46	1.724	225	35 %	122

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk Desa Wadeng Kabupaten Gresik sebanyak 528 KK serta yang tergolong dalam RTSM berjumlah 225 KK. Sedangkan yang mendapatkan program bantuan PKH hanya sebanyak 122 KK sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan PKH di Desa Wadeng belum merata. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kemiskinan sehingga Desa Wadeng Kabupaten Gresik ini perlu mendapatkan penerapan program bantuan PKH. Maka permasalahan ini menunjukkan bahwa program bantuan PKH belum diberikan secara merata oleh setiap RTSM.

Gambar 1.1
Alur Pelaksanaan PKH



Sumber: Pedoman Umum PKH 2022

Berdasarkan gambar 1.1 di atas terlihat jelas dalam alur pelaksanaan PKH, mulai dari dalam mengumpulkan data dalam sasaran program, dengan mengadakan sosialisasi yang seperti pertemuan awal dengan orang yang menerima manfaat serta melakukan konfirmasi, lalu syarat yang dipenuhi untuk menjadi penerima manfaat, setelah memenuhi semua syarat dan sudah menjadi penerima manfaat selanjutnya para penerima manfaat mendapatkan penyaluran dana PKH dan layanan berupa pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping berupa pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga/ *Family Development Session* (FDS) dan mendapatkan layanan serta verifikasi yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, setelah mendapatkan layanan para penerima manfaat harus memiliki komitmen dengan ketentuan yang sudah ada untuk para penerima manfaat dan akan mendapatkan sanksi jika para penerima manfaat melanggar ketentuan yang sudah ada, dan yang terakhir pemutakhiran data apakah ada perubahan data melalui laporan pararima manfaat.

Adanya kebijakan program pemutakhiran data PKH perubahan atau seluruh data awal yang tercatat pada master database. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada perubahan. Kemudian pemutakhiran data yang dilakukan oleh operator dengan mengirimkan data para peserta PKH yang telah diverifikasi kepada UPPKH Pusat. Data tersebut dijadikan pedoman untuk menentukan besarnya dana PKH tahap selanjutnya. Manfaat dalam penerima pemutakhiran data keluarga PKH pada Pasal 32 yang dilaksanakan setiap adanya perubahan sebagian atau mengenai seluruh data anggota keluarga yang sebagai penerima PKH. Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data. Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manajemen PKH. Peneliti yang diadakan di dusun tersebut penduduk yang terbilang mampu juga mendapatkan PKH. Dilihat

dari penduduk yang memiliki rumah sudah berinding serta sudah berkeramik. Selain, itu penduduk yang mampu membiayai sekolah anaknya sampai perguruan tinggi dan memiliki kendaraan yang berkondisi baik juga mendapatkan PKH (Dinas Sosial, 2015).

Hal ini dapat mengidentifikasi bahwa penduduk yang tergolong kategori mampu masih mendapatkan bantuan PKH. Oleh karena itu, perlu adanya pemutakhiran data penerima PKH lebih lanjut agar bantuan tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Sistem Pemutakhiran Data Penerima Bantuan PKH Di Desa Wadeng Kabupaten Gresik”

Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas terdapat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana evaluasi sistem pemutakhiran data PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik, (2) Bagaimana evaluasi sistem aplikasi pemutakhiran data PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini sebagai berikut: (1) Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti Ingin menganalisis evaluasi sistem pemutakhiran data PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik. (2) Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti ingin menganalisis evaluasi data sistem pemutakhiran data PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik.

Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini hasil penelitian memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi PKH Dalam penerimaan dan pendataan calon bantuan di Desa Wadeng Kabupaten Gresik
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat masukan dari masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada, serta menambah wawasan serta relasi penulis.

Tinjauan Pustaka

Kajian Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai nilai secara paksa kepada seluruh anggota

masyarakat.

Menurut Woll sebagaimana dikutip (Tangkilisan, 2013) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. David Easton sebagaimana dikutip (Leo Agustino, 2019) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Implementasi Kebijakan

Penerapan implementasi merupakan salah satu kegiatan dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan bersentuhan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa dalam tahap perencanaan dan perumusan kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahap implementasi tidak dianggap optimalisasi, maka tentu saja tidak jelas apa yang diharapkan dari suatu produk kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagi sebuah kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk menerapkan kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah yang langsung dilaksanakan dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan turunan atau turunan kebijakan publik sebagai penjelasan kebijakan publik atau sering disebut sebagai aturan implementasi (Nugroho, 2012).

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi diartikan sebagai proses memberikan nilai terhadap sesuatu dengan menggunakan kriteria. “*Evaluation is to give value to something with the criterion*”. Dalam menentukan nilai suatu objek dirujuk dan/atau dibandingkan dengan kriteria evaluasi yakni (a) ada objek yang dinilai (b) ada kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan nilai dan (c) ada perbandingan antara hasil penilaian dengan kriteria (Sudjana: 2013).

Menurut Widoyoko (2012:10) Evaluasi program merupakan proses yang sistem serta berkesinambungan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan pengambilan keputusan, menetapkan kebijakan maupun merancang program selanjutnya. Ada beberapa model evaluasi yang dapat digunakan, yakni, evaluasi berbasis tujuan, evaluasi tidak berbasis tujuan, evaluasi formatif dan sumatif, evaluasi responsif, evaluasi CIPP, dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dimana yang bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana Evaluasi pemutakhiran data penerimaan bantuan PKH Di Desa Wadeng Sidayu Kabupaten Gresik.

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai Evaluasi pemutakhiran data penerimaan bantuan PKH.

Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer Jenis data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari survei di lapangan dengan cara wawancara dan Dokumentasi.
2. Sumber data Sekunder yaitu Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, artikel, website resmi, e-book, buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yaitu: Wawancara, Observasi, Studi kepustakaan (library research), Dokumentasi dan Internet research.

Analisis Data dan Keabsahan Data

Dalam Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Miles dan Huberman, dimana keduanya sama-sama setuju bahwa tahapan untuk melakukan analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga, yaitu: Data Collection (Pengumpulan data), data condensation (Reduksi Data), data display((Penyajian Data), conclusion (Kesimpulan) (Sugiono, 2020).

Pembahasan

Evaluasi Sistem Pemutakhiran Data PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik

Evaluasi sistem pelayanan pemutihan data PKH merujuk pada sejauh mana sistem tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan cara yang efisien dan optimal. Dengan adanya sistem ini proses dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya. Pelayanan pemutihan data dapat mengurangi tingkat birokrasi yang terlibat dalam proses pemutihan data. Penggunaan teknologi

mengotomatisasi beberapa tahapan sehingga mengurangi kesalahan dan birokrasi yang memperlambat proses.

pelayanan pemutihan data masyarakat juga dapat mengakses layanan pemutihan data kapan saja dan dimana saja melalui internet. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentang PKH Kantor PKH Kabupaten Gresik meluncurkan pemutakhiran data PKH guna memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dengan adanya pemutihan data mengalami adanya peningkatan pelayanan pemutihan data dari setiap tahun ke tahunnya.

Selain itu, pemerintah dan tim pengelola *system* pemutihan data terus melakukan evaluasi dan pengembangan secara terus menerus untuk memastikan *system* tersebut tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan pemutihan data dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemohon pemutakhiran data PKH itu sendiri.

Dalam penelitian ini, fokus utama peneliti adalah mengkaji tentang sejauh mana program pemutihan data dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, (2017) Evaluasi menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis terhadap pelaksanaan program pemutihan data PKH. Dalam mengukur suatu program tentu memiliki standar yang harus dicapai.

Menurut Budiani (2007:53), mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan tempat indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Dengan empat indikator tersebut, peneliti dapat mengetahui evaluasi penggunaan *system* pemutihan data PKH.

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran dapat dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan. Dalam pelayanan publik sasarannya tidak lain adalah masyarakat. Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 67 Tahun 2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan itu program yang diciptakan untuk pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Seperti halnya Sistem Pemutihan Data di Kantor PKH Kabupaten Gresik sasaran utamanya adalah masyarakat. Hal tersebut juga

disampaikan dalam wawancara, yang mengatakan bahwa sasaran dari Sistem Pemutakhiran Data PKH adalah masyarakat yang akan mengajukan pemutakhiran Data khusus wilayah Kabupaten Gresik saja. Dengan tujuan yang mendasar yaitu memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus Pemutakhiran Data PKH. Karena dalam pelayanan sebelumnya masyarakat harus datang ke kantor dan membawa berkas-berkas.

“Selain masyarakat, sasarannya yakni sesuai dengan misi yang dijalankan oleh Kantor PKH Kabupaten Gresik. Misi tersebut adalah ‘Meningkatkan kualitas pelayanan.’”

Ketepatan sasaran program dapat juga dilihat dari SKM (Survei Kepuasan Masyarakat). bahwa kepuasan masyarakat terpenuhi. Hasil survei dari data responden dapat disimpulkan bahwa dari kesesuaian persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, dalam pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan, perilaku petugas dalam pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, penanganan pengaduan pengguna layanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 87,45 dengan kategori A sangat baik.

Dengan demikian, pelaksanaan penggunaan Sistem Pemutakhiran Data PKH sudah mencapai sasaran yang di targetkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil SKM (survei kepuasan masyarakat) dalam menerima layanan

b. Sosialisasi Program

Dalam penelitian ini, didasarkan pada teori ukuran evaluasi yang ditemukan oleh Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017). Fokusnya adalah pada indikator Sosialisasi Program, yang mencakup kemampuan Kantor PKH Kabupaten Gresik dalam menyampaikan informasi program Pemutakhiran Data PKH kepada masyarakat. Maka sosialisasi harus dilakukan supaya seluruh informasi disampaikan kepada masyarakat, serta dapat dipahami guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini Kantor PKH Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi program aplikasi (SIKS-NG) Sistem Pemutakhiran Data PKH melalui media sosial mudah dijangkau oleh berbagai kalangan dan memiliki tingkat

penyebaran informasi lebih cepat. Dalam hal sosialisasi program, kantor PKH Kabupaten Gresik masih berupaya untuk memperkenalkan aplikasi (SIKS-NG) Sistem Pemutakhiran Data PKH Kepada masyarakat. Sosialisasi difokuskan melalui media sosial.

c. Tujuan Program

Tujuan adalah faktor utama dalam menentukan evaluasi suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai dalam pelaksanaannya. Tujuan dari program Sistem Pemutakhiran Data PKH ini yaitu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus data tersebut.

Dalam hasil penelitian ini, berdasarkan teori ukuran evaluasi yang dikemukakan oleh pendamping PKH (2017) menjelaskan bahwa “tujuan program yakni berkenaan dengan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.” Tujuan program menjadi dasar mengapa program tersebut harus ada, dan apa yang ditargetkan. Menurut Sutrisno (2007:125) Tercapainya tujuan program diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

Program Sistem Pemutakhiran Data PKH memiliki tujuan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 PKH Sistem Pemutakhiran Data PKH Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Selain berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut tujuan dari program Sistem Pemutakhiran Data PKH adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan publik, terutama dalam hal pelayanan Sistem Pemutakhiran Data PKH. Dalam uraian yang disampaikan oleh 3(tiga) bidang di Kantor PKH Kabupaten Gresik bahwa berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari SKM (survei kepuasan masyarakat) yang memperoleh kategori A sangat baik. Tetapi berkaitan dengan penggunaan Sistem Pemutakhiran Data PKH masih ada pembaharuan sistem agar mempermudah akses melalui *handphone*.

Evaluasi Data Program Pemutakhiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Wadeng Kabupaten Gresik

Jika melihat pelaksanaan pelayanan Sistem Pemutakhiran Data PKH suatu

program, maka dalam pelaksanaannya pasti juga dapat diketahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mengiringi pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program Sistem Pemutakhiran Data PKH Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Kabupaten Gresik juga tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang menjadi salah satu faktor penting untuk dapat mengetahui seberapa baik program Pemutakhiran Data PKH ini berjalan.

a. Sarana dan Prasarana yang memadai

Evaluasi suatu layanan dapat terlihat dari kelengkapan, ketersediaan, dan kondisi fasilitas yang disediakan. Karena fasilitas yang tersedia dapat membantu dan mendukung proses pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahmudi (2015), perlu dibentuk standar untuk sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dari penyelenggara pelayanan publik.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Mathis Jackson, (2006) Sumber Daya Manusia merupakan suatu kerangka sistem-sistem formal dalam satu wadah untuk memastikan pengguna bakat manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor utama yang memainkan peran penting dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena manusia adalah pelaku yang terlibat dalam memberikan suatu layanan.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengoperasikan sistem dan memanfaatkan teknologi, jika Sumber Daya manusia (SDM) berkualitas maka dapat memanfaatkan teknologi dengan baik sehingga proses pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan optimal.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Evaluasi sistem pemutakhiran PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, validasi, pendampingan pencairan bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen peserta PKH serta adanya sanksi yang cukup jelas dan tegas bagi KPM yang tidak memenuhi komitmennya, proses seleksi dan penetapan program hanya dilakukan di tingkat nasional antara *stakeholder* terkait

(Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Kabupaten Gresik, dll). PPKH Kabupaten Gresik Utara hanya menjalankan tugas dan kewajiban dan fungsi yang dimandatkan oleh PPKH dari Pusat yang dalam hal ini langsung dari Kementerian Sosial.

- b. Evaluasi Data PKH adanya dukungan koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dalam implementasi sistem pemutakhiran PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik juga antusias para peserta PKH, peran pendamping PKH merupakan aktor yang sangat penting. Faktor penghambat pada awal pelaksanaan daya tangkap dari masyarakat miskin sebagai penerima bantuan masih kurang, penerima bantuan cenderung agak sulit untuk diajak berkoordinasi dan partisipasi masyarakat masih rendah, konflik yang terjadi antara individu. Dari keterangan pendamping PKH di desa bukit Kemuning, masyarakat disana banyak yang kurang paham terhadap program tersebut.

Saran

- a. Dalam hal ini penulis menyarankan yaitu peran pendamping terus ditingkatkan. Begitu juga peran dari peserta PKH diharapkan untuk tetap semangat, serius, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya program diskusi maupun pertemuan lain yang sifatnya mendukung.
- b. Keberhasilan sistem pemutakhiran PKH ada dalam peran pendamping dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban kepada masyarakat dan ikhlas, baik dalam situasi dan lokasi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.
- c. Peran pemerintah daerah diharapkan memberikan motivasi kepada KPM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak yang baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait juga menjadi faktor yang terwujudnya tujuan dari implementasi sistem pemutakhiran PKH.
- d. Peneliti menyarankan kepada seluruh petugas PKH di Desa Wadeng Kabupaten Gresik dari setiap bidang untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang sistem pemutakhiran PKH ke masyarakat luas agar mereka paham dan tidak terjadi kecemburuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. (2014). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, S., & Jabar (2010) Evaluasi Program Pendidikan. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Aan Komariah, Djam'an Satori, (2011), Metode

- Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta
- Barata, Atep Adya. (2003) Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Basuki, Sulistyio. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ada University Press.
- Campbell, J.P (1989), Teori Evaluasi, dalam Richard M.Efektivitas Organisasi 2005 Bandung: Erlangga
- Kementerian Sosial. (2015). Buku Kerja dan Operator PKH. Direktorat Jaminan Sosial. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Kementerian Sosial RI. (2015). *Buku Kerja Pendamping Dan Operator PKH*. Direktorat Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos RI.
- Kunto,A dan jabar, C. (2010). *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: Bumi
- Mardapi Djemari (2012). *Pengukuran penilai dan evaluasi pendidikan*: yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Mathis, R.L and Jackson, J.H. (2006). Human Resource Management. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif. Jakarta.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitati*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:Leutikaprio
- Nugroho, Riant D. (2012) Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2012). Evaluation Theory, Models, and Applications. John Wiley & Sons
- Subarsono, A.G (2016). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Widoyoko, eko putra. (2012). Evaluasi program pembelajaran: Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi (2007) Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi),Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- JURNAL**
- Ayuningtias, D. (2018). Evaluasi PKH Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk.
- Alamiin, A R . 2010. *Analisis Peran Pendamping Dalam PKH Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*.
- Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar). Jurnal Ekonomi Sosial Vol.2 No.1.
- Tersedia:
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/viewFile/3191/2288>
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi PKH di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Jurnal Governansi, 4(1), 45-56.
- Evi, R., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui PKH. *Journal Of Non Formal Education And Community Empowerment*, 1(2).
- Huzaipa (2014), Evaluasi Kebijakan PKH Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 7, Juli 2014* Hlm 158-169.
- Hasibah, I., & Anadza, H. (2022). Efektivitas Program Pelayanan Online Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). *Journal Public Uho*, 5(4), 1027-1040.
- Isnaini, R. (2014), Evaluasi Pelaksanaan PKH Pada Bidang Pendidikan Di kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai . *Jurnal Administrasi Publik vol.2 no.2*.
- Kartini (2017).Analisis Efektivitas PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan diTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Kabupaten Way Kanan
- Khadafi, R. and Mutiarin, D. (2017) 'Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul', *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), pp. 327–362. doi: 10.18196/JGPP.V4I2.2993.
- Lejiu, Agustinus, dkk. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 4.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Huseini. (1987). Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta
- Mirfaq, R., Gunawan, W., & Akbar, I. (2021). Evaluasi Sistem pemutakhiran data PKH Tahun 2019 (Studi Pada pemutakhiran data PKH (Siup). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 88-100.
- Nataya, Elga Jatu. "Pemberdayaan Keluarga

Penerima Manfaat Melalui PKH Di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun." (2017).
Nadiatussilmi, Nadiatus Silmi, Hayat Hayat, and Hirshi Anadza. "Inovasi Program Sakera Mesem dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3.06 (2022): 946-955.

Sonia Herlian, G., 2022. Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Ciamis.
Susanto, Herman. (2016). Evaluasi PKH Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri. Jakarta.
Susnaini (2014). Evaluasi PKH Tahun 2013 Di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
Pratama, Nimas Aulia Nandha, Slamet Muchsin, and Roni Pindahanto Widodo.
"Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu (Studi Inovasi Mobil Senyum, PKK Penak, dan 3 In 1)." *Respon Publik* 14.4 (2020): 59-69.
Warjukur, v. P. F. (2022). Efektivitas pelayanan perizinan berbasis *online* di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten fakfak provinsi papua barat (doctoral dissertation, institute pemerintahan dalam negeri)
Yuliani, Monika. (2020) *Efektivitas Pengelolaan PKH Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo.

PERATURAN PERUNDANG--UNDANGAN

UUD No. 40 Tahun 2004 (JAMSOSNAS).
Pasal 32 huruf i ayat (1) dan (2)
Permensos No. 5 Tahun 2021.
UURI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1)

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. (2020). *Garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Luwu*. Diperoleh dari <http://luwukab.bps.go.id>